

IMPLEMENTASI AUDIT INTERNAL STANDAR PROSES PENDIDIKAN PADA SEKOLAH UNGGULAN DI KOTA PEKANBARU

Caska

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau

Email: riodirgantro@yahoo.com

ABSTRAK. Fokus utama penelitian yaitu implementasi audit internal pada standar proses pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peta mutu pendidikan di Sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian: (1) Rata-rata kondisi perencanaan pengembangan silabus sebesar 71,4. (2) Rata-rata kondisi perencanaan pelaksanaan pembelajaran sebesar 71,4. (3) Rata-rata kondisi prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran sebesar 72,7. (4) Rata-rata kondisi persyaratan proses pembelajaran sebesar 97,5. (5) Rata-rata kondisi pelaksanaan pembelajaran sebesar 80. (6) Rata-rata kondisi pemantauan sebesar 80. (7) Rata-rata kondisi supervisi sebesar 73,3. (8) Rata-rata kondisi evaluasi sebesar 73,3. (9) Rata-rata kondisi pelaporan sebesar 70. (10) Rata-rata tindak lanjut sebesar 70.

Kata Kunci: peta mutu pendidikan, standar proses

ABSTRACT. The main focus of the research was the implementation of internal audit in the standard educational process. The aim of the research was to find out the mapping of the quality of education in schools. The method used was descriptive method. The research was a case study research conducted at Senior High School (SMA) Plus Pekanbaru. The findings of the research showed that (1) the average condition of the syllabus development planning was 71.4; (2) the average condition of the learning implementation planning was 71.4; (3) the average condition of planning design principles of the learning implementation was 72.7; (4) the average condition of the learning process requirements was 97.5; (5) the average condition of the implementation of learning was 80; (6) the average condition monitoring was 80; (7) the average condition of supervision was 73.3; (8) the average condition of evaluation was 73.3; (9) the average condition of reporting was 70 and (10) the average of the follow-up was 70.

Keywords: map of the quality of education, standard process

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya itu sendiri. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses pendidikan peserta didik, di antaranya kurikulum, guru dan penyelenggaraan pendidikan, peserta didik, pemerintah, masyarakat, orang tua dan segala sarana dan prasarana yang diperlukan

dalam proses pendidikan sekolah (Caska, 2015).

Untuk mengetahui mutu pendidikan diperlukan acuan teknis yang dapat dijadikan pedoman untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program peningkatan mutu yang akan dilaksanakan. Tolak ukur ini perlu terdiskripsi secara eksplisit agar penyelenggara pendidikan dapat mempedomaninya dalam proses pembelajaran di sekolah. Acuan dalam bentuk

standar pelayanan minimal ini yang harus dipedomani oleh penyelenggara pendidikan.

Di sisi lain, pelayanan dengan segala fasilitas pendukungnya yang disediakan penyelenggara pendidikan harus mengacu pada kebutuhan peserta didik. Pelayanan yang bermutu akan memberikan dampak positif pada hasil belajar peserta didik. Bila anak senang belajar, potensi yang dimilikinya akan berkembang dengan sempurna, secara integral perkembangan peserta didik akan lebih optimal, yang meliputi intelektual, emosional, kreatifitas, sosial serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat (Caska, 2015).

Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Kemendikbud selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusia seperti apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Kota pekanbaru tengah giat membangun, maka kualitas bidang pendidikan mutlak untuk jaga kualitasnya, sehingga perlu adanya standar pelayanan minimum. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut tergambar dari pemetaan mutu sekolah berdasarkan evaluasi diri sekolah (EDS) pada tahun 2013 (Jefry F. Haloho, 2015b). Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan oleh Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah dilakukan dengan berbagai cara, salah saaatunya melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi. Penjaminan dan peningkan mutu pendidikan dasar dan menengah berkaitan dengan tiga aspek utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan; (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan; dan (3) peningkatan mutu dan

penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan (LPMP Provinsi Riau, 2012).

Sekolah harus melakukan evaluasi diri untuk dapat memperbaiki mutu pelaksanaan pendidikan. Hasil dari evaluasi diri tersebut digunakan untuk membuat rencana kerja sekolah (RKS) agar mutu sekolah dapat ditingkatkan. Kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan apakah tindakan perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dalam upaya peningkatan mutu. Dengan demikian, kegiatan audit mutu internal merupakan pelengkap dan pelaksanaan manajemen sekolah yang bermutu.

Fenomena di lapangan ternyata upaya mencapai mutu dengan pemenuhan SNP, tidak dapat dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga sekolah tidak dapat memenuhi 8 SNP, salah satu di antaranya karena rendahnya budaya mutu di satuan pendidikan. Permasalahan ini harus diatasi dengan menerapkan manajemen sekolah yang dapat menumbuhkan budaya mutu secara bertahap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem kontrol mutu melalui pelaksanaan audit mutu pendidikan secara internal.

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi audit internal dalam standas proses pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan fokus utama tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peta mutu pendidikan di Sekolah Unggulan Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Kota Pekanbaru.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini mengacu pada standar mutu pendidikan dasar dan

menengah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Fokus Penelitian: Peta mutu standar proses dengan indikator: (1) Perencanaan pengembangan/penyusunan silabus; (2) Perencanaan pengembangan/penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (3) Prinsip-prinsip penyusunan RPP; (4) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran; (5) Pelaksanaan Pembelajaran; (6) Pemantauan; (7) Supervisi; (8) Evaluasi; (9) Pelaporan; dan (10) Tindak lanjut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Pelaksanaan Kurikulum di SMA Plus Pekanbaru.

Dari dokumen kurikulum yang dimiliki oleh SMAN Plus tergambar bahwa isi muatan kurikulum mengandung mata pelajaran wajib yang dimiliki oleh sekolah menengah pada umumnya. Selain itu, sekolah menyajikan pembelajaran muatan lokal dengan mengangkat budaya melayu sebagai materi muatan lokal. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan dibimbing oleh guru dan tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan melalui pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir serta bimbingan keperguruan tinggi peserta didik, kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka di depan kelas dengan durasi 1 x 45 menit untuk setiap tingkat. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan diri melalui program ekstrakurikuler terdiri dari rohis, pramuka, Karya Ilmiah Remaja, rebana, seni baca Al quran, english debate, olah raga

prestasi, UKS, seni tari dan music (Caska, 2015).

Pada muatan kurikulum juga diatur pengaturan beban belajar siswa, dimana kurikulum yang dipergunakan di SMAN Plus mengacu pada PP nomor 32 tahun 2013, untuk SMAN Plus sudah menerapkan struktur kurikulum 2013 dengan penambahan jam pada beberapa jam pelajaran misalnya pada kelas X penambahan 3 jam pada pelajaran bahasa Inggris, 3 jam pada mata pelajaran kimia 1 jam pada mata pelajaran biologi sehingga total beban belajar siswa kelas X adalah 49 jam. Untuk kelas XI penambahan jam pada mata pelajaran bahasa Inggris 2 jam dan kimia 1 jam, untuk kelas XII mengacu pada struktur kurikulum KTSP dengan beban belajar 49 jam. Ada pun latar belakang penambahan beban belajar siswa adalah tidak proporsionalnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan (Caska, 2015).

Dalam kurikulum 2013 strukturnya sebagai berikut: (1) Kelompok mata pelajaran wajib yaitu kelompok A dan B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan efektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor; (2) Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu peminatan Matematika dan Sains, peminatan ilmu-ilmu sosial, dan peminatan ilmu-ilmu bahasa, maka di karenakan di SMAN Plus hanya memiliki peminatan pada bidang studi Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia; (3) Mata pelajaran Pendalaman, tujuannya untuk memilih mempelajari satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan; dan (4) Mata pelajaran pilihan lintas minat, untuk di SMAN Plus difasilitasi dengan 3 bidang studi yaitu geografi, sosiologi dan bahasa Inggris (Caska, 2015).

Peta Mutu Standar Proses Pendidikan di SMA Unggulan Kota Pekanbaru.

Peta Mutu Standar Proses Pendidikan di SMA Unggulan Kota Pekanbaru disajikan pada

Tabel 1 sampai dengan Tabel 10.

Tabel 1: Perencanaan pengembangan/ penyusunan silabus di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|----|--|-------------|
| 1. | Pemahaman Guru dalam Dasar-dasar perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus | 60 |
| 2. | Pembuatan perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus mata pelajaran oleh guru sendiri dan memperhatikan ketentuan dalam pembuatan RPP: 1) identitas mata pelajaran, 2) SK, 3) KD, 4) indikator pencapaian kompetensi, 5) tujuan pembelajaran, 6) materi ajar, 7) alokasi waktu, 8) metode pembelajaran, 9) kegiatan pembelajaran, 10) penilaian hasil belajar, dan 11) sumber belajar. | 60 |
| 3. | Pembuatan Perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus mata pelajaran melalui MGMP sekolah. | 80 |
| 4. | Guru melaksanakan Perencanaan pengembangan atau penyusunan silabus mata pelajaran melalui MGMP sekolah. | 80 |
| 5. | Guru merencanakan/mengembangkan silabus mapel sama dengan silabus yang telah disusun oleh pusat. | 80 |
| 6. | Guru menyusun Silabus disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. | 80 |
| 7. | RPP dan silabus Disahkan oleh Kepala Dinas Kota. | 60 |
| | Total | 500 |
| | Rata-rata | 71,4 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 2: Perencanaan pengembangan atau penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|----|--|-------------|
| 1. | Guru melaksanakan ketentuan perencanaan penyusunan atau pengembangan RPP mata pelajaran. | 80 |
| 2. | Guru membuat Perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP mapel oleh guru sendiri. | 60 |
| 3. | Guru membuat Perencanaan pengembangan atau penyusunan RPP mapel MGMP sekolah. | 80 |
| 4. | Guru melaksanakan Perencana pengembangan atau penyusunan RPP mapel MGMP sekolah. | 80 |
| 5. | Guru membuat Merencanakan/mengembangkan RPP mapel sama dengan silabus yang telah disusun oleh pusat. | 80 |
| 6. | Guru membuat RPP disusun dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. | 60 |
| 7. | Guru membuat validasi RPP disahkan oleh Kepala Dinas Kab/Kota. | 60 |
| | Total | 500 |
| | Rata-rata | 71,4 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 3: Kondisi Prinsip- prinsip penyusunan RPP di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|-----|---|-------------|
| 1. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip perbedaan individu siswa. | 40 |
| 2. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip partisipasi aktif siswa. | 60 |
| 3. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip budaya membaca dan menulis. | 80 |
| 4. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip umpan balik dan tindak lanjut. | 60 |
| 5. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan. | 80 |
| 6. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Prinsip penerapan teknologi informasi dan komunikasi. | 80 |
| 7. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Kesesuaian/relevansi bahan ajar. | 80 |
| 8. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Kuantitas terpenuhi. | 100 |
| 9. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Kedalaman materi. | 60 |
| 10. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Variasi/jenis bahan ajar yang digunakan. | 80 |
| 11. | Guru dalam menyusun RPP memperhatikan Keterjangkauan. | 80 |
| | Total | 800 |
| | Rata-rata | 72,7 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 4: Kondisi Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|----|--|-------------|
| 1. | Sekolah menggunakan Rombongan belajar: 32 siswa/ kelas. | 100 |
| 2. | Guru memiliki Beban kerja minimal guru: 24 jam/minggu. | 100 |
| 3. | Guru menggunakan Buku teks pelajaran: (a) ditetapkan bersama dan sesuai Permendiknas; (b) ratio 1:1 (per mapel per siswa); (c) buku panduan guru, referensi, pengayaan, dll. | 100 |
| 4. | Guru melaksanakan Pengelolaan kelas tepat / sesuai tuntutan kompetensi. | 80 |
| 5. | Sekolah memperhatikan ketentuan permendiknas tentang Jumlah rombongan belajar. | 100 |
| 6. | Guru melaksanakan Kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. | 100 |
| 7. | Guru melaksanakan tahapan Kegiatan inti, langkah-langkah dalam kegiatan inti : a) eksplorasi, b) elaborasi, dan c) konfirmasi. | 100 |
| 8. | Guru melaksanakan Kegiatan penutup (merangkum, penilaian, umpan balik, tindak lanjut, rencana berikutnya) | 100 |
| | Total | 780 |
| | Rata-rata | 97,5 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 5: Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|----|--|-------------|
| 1. | Guru melaksanakan evaluasi Keterlaksanaan penilaian hasil belajar. | 80 |
| 2. | Guru melaksanakan Pemenuhan ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar. | 80 |
| 3. | Guru melaksanakan Penggunaan/implementasi Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran | 80 |
| | Total | 240 |
| | Rata-rata | 80 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 8: Kondisi Evaluasi di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|-----------|---|-------------|
| 1. | Kepala sekolah memiliki Tujuan dalam melaksanakan evaluasi guru. | 80 |
| 2. | Kepala sekolah menyusun Strategi/cara dalam melaksanakan evaluasi kinerja guru. | 60 |
| 3. | Kepala sekolah melaksanakan/menindaklanjuti Orientasi evaluasi kinerja guru. | 80 |
| Total | | 220 |
| Rata-rata | | 73,3 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 9: Kondisi Pelaporan di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|-----------|---|-------------|
| 1. | Guru membuat Pelaporan pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran. | 80 |
| 2. | Guru melaksanakan Tindak lanjut pelaporan. | 60 |
| Total | | 140 |
| Rata-rata | | 70 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Tabel 10: Kondisi Tindak lanjut di SMA Unggulan Kota Pekanbaru

| No | Aspek | Kondisi (%) |
|-----------|---|-------------|
| 1. | Kepala sekolah memberi Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. | 80 |
| 2. | Kepala sekolah memberi teguran yang bersifat mendidik terhadap guru yang belum memenuhi standar. | 60 |
| Total | | 140 |
| Rata-rata | | 70 |

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015

Berdasarkan temuan dari verifikasi data dan dokumen yang dimiliki SMAN Plus maka untuk pencapaian standar proses di SMAN Plus sudah terlaksana dengan baik. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas manajerialnya. Kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang ideal, kompetensi dan komitmen yang kuat sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam memimpin sekolahnya dalam mencapai mutu yang baik.

Dalam mengimplementasikan audit internal di sekolah, kepala sekolah memegang peranan penting dalam upaya mendorong tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk ikut berperan dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas. Dengan gaya atau perilakunya diharapkan kepala sekolah dapat secara efektif melaksanakan audit internal (Tjiptono Fandy, 2006).

Audit internal dalam sekolah berarti mengadakan perubahan mendasar dalam organisasi sekolah, yang meliputi perubahan kultural dan perubahan substantif dalam manajemen sekolah. Sekolah bermutu akan terwujud dengan baik jika seorang kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang diwujudkan melalui kinerja yang baik. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan berupa motivasi, konsep diri, kemampuan atau skill dan karakteristik atau kepribadian semuanya itu merupakan kapasitas diri atau modal dasar yang mendukung terwujudnya keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (Isda Pramuniati, 2015).

Kepala sekolah harus mampu menciptakan sebuah sekolah yang mampu melayani pelanggan dalam hal ini masyarakat sekolah. Manajemen mutu merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk mencapai tujuan. Melalui kemampuan manajerialnya dalam melayani para pelanggan diharapkan kepala sekolah dapat menimbulkan kepuasan bagi para pelanggan yaitu siswa, orang tua siswa dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sekolah yang bermutu adalah sekolah yang memiliki kepemimpinan yang tepat dengan melaksanakan keseluruhan unsur determinan terhadap kualitas yang diharapkan. Sekolah bermutu juga dapat dilihat sejauh mana iklim Sekolah memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya sekolah bermutu. Kemudian sejauh mana kepala sekolah mampu mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya audit internal di sekolah.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil (Mulyasa, 2003): *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan

telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori *education production function* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, sering kali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan, hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya (Jefary F. Halomo, 2015a; Caska, 2015).

Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang sekolah harus berbasis mutu sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan (Ridwan Sani, 2015a; 2015b.)

Mutu merupakan derajat keunggulan sebuah pelayanan jasa pendidikan. Suatu pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa lainnya memiliki tingkat keunggulan relatif, produk atau pelayanan jasa yang lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa yang bermutu. Mutu adalah sesuatu kesempatan untuk menempatkan pada posisi kompetitif. Bagi penyedia jasa, kesempatan untuk berkompetisi merupakan hal sangat berharga, karenanya munculnya kompetitor baru baginya merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan mutu layanan jasa. Mutu pada dasarnya merupakan penyesuaian manfaat/kegunaan yang berarti harapan pelanggan sesuai dengan kepuasan pelanggan jasa pendidikan (Caska, 2015).

SIMPULAN

Peta mutu pendidikan di Sekolah sebagai berikut: (1) Kondisi Perencanaan pengembangan/ penyusunan silabus: 4 indikator baik dan 3 indikator cukup. Rata-rata 71,4; (2) Kondisi Perencanaan pengembangan/penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): 4 indikator baik 3 indikator cukup. Rata-rata 71,4; (3) Kondisi Prinsip-prinsip penyusunan RPP: 7 indikator baik, 3 indikator cukup dan 1 indikator cukup. Rata-rata 72,7; (4) Kondisi Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran: 8 indikator baik. Rata-rata 97,5; (5) Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran: 3 indikator baik. Rata-rata 80; (6) Kondisi Pemantauan: 3 indikator baik. Rata-rata 80; (7) Kondisi Supervisi: 2 indikator baik dan 1

indikator cukup. Rata-rata 73,3; (8) Kondisi Evaluasi: 1 indikator baik dan 1 indikator cukup. Rata-rata 73,3; (9) Kondisi Pelaporan: 1 indikator baik dan 1 indikator cukup. Rata-rata 70; (1) Kondisi Tindak lanjut: 1 indikator baik dan 1 indikator cukup. Rata-rata 70.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan FKIP Universitas Riau yang telah membiayai penelitian ini melalui Hibah Penelitian Strategis Fakultas Tahun Anggaran 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Caska, 2015, *Implementasi Audit Internal Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Unggulan Di Kota Pekanbaru*, Laporan Hasil Penelitian, LPPM UR, Pekanbaru.
- Fandy Tjiptono, 2006, *Total Quality Management*, Edisi II. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Isda Pramuniati, 2015, *Audit Mutu Internal*, Bahan Worksop dan Rakor Pelaksanaan SBSNP, Kementerian Pendidikan dan Ke, Jakarta.
- Jefary F. Halomo, 2015a, *SBSNP Sebagai Solusi Peningkatan Mutu*, Bahan Worksop dan Rakor Pelaksanaan SBSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- _____, 2015b, *Peta Mutu Pendidikan dan Perencanaan Pendidikan di Daerah*, Bahan Worksop dan Rakor Pelaksanaan SBSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- LPMP Provinsi Riau, 2012, *Rencana Strategis LPMP Provinsi Riau*, Pekanbaru.
- Mulyasa, 2003, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda Karya.
- Ridwan Sani, 2015a, *Pengembangan Kompetensi Sekolah Menjadi SBSNP*, Bahan Worksop dan Rakor Pelaksanaan SBSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- _____, 2015b, *Penyiapan Dokumen Mutu oleh Satuan Pendidikan*, Bahan Worksop dan Rakor Pelaksanaan SBSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.